

## Menilik Efektivitas Pelaksanaan *E-government* Pemerintah Daerah

Oleh:

<sup>1</sup> Ashar Prawitno; <sup>2</sup> Andi Irpan Badawi; <sup>3</sup> Aiman Sabar Rezeky

<sup>1,2,3</sup> Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Hasanuddin

Email. [asharprawitno@gmail.com](mailto:asharprawitno@gmail.com)

### Abstrak

Implementasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e-government*) semakin dipacu dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, namun tetap selalu ada permasalahan yang terjadi. Begitu pun yang terjadi dalam pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *e-government* serta faktor yang mempengaruhi implementasi *e-government* di Kabupaten Gowa. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Gowa belum cukup efektif, walaupun dari segi *input* telah tersedia payung hukum berupa Peraturan Bupati Gowa Nomor 37 Tahun 2017 dan segi produksi telah tersedia fasilitas pembuatan *website* dan aplikasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa, namun dari segi *output*, ternyata sebagian besar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Gowa belum memiliki *website* maupun aplikasi penunjang dalam pelaksanaan *e-government*. Sejauh ini hanya 13 dari 36 SKPD yang memiliki *website*. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Gowa, yaitu kurangnya koordinasi antara SKPD di Kabupaten Gowa, kondisi geografis Kabupaten Gowa yang sebagian besar daratan tinggi mengakibatkan aksesibilitas jaringan internet belum merata, kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana belum mumpuni, serta ketersediaan anggaran yang belum mencukupi.

**Kata Kunci:** Efektivitas, E-government, Pelaksanaan, Pemerintah

### Abstract

*The implementation of information technology-based governance (e-government) is increasingly being encouraged and developed by local governments, but there are always problems that occur. The same thing happened in the implementation of e-government in Gowa Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of e-government and the factors that influence the implementation of e-government in Gowa Regency. This research is a qualitative research with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the study indicate that the implementation of e-government in Gowa Regency has not been effective enough, although in terms of input there has been a legal umbrella in the form of Gowa Regent Regulation Number 37 of 2017 and in terms of production there are facilities for making websites and applications at the Office of Communication, Information, Statistics, and Gowa Regency coding, but in terms of output, it turns out that most of the Regional Government Work Units (SKPD) in Gowa Regency do not have websites or supporting applications in the implementation of e-government. So far, only 13 of the 36 SKPD have websites. The factors that influence the implementation of e-government in Gowa Regency, namely the lack of coordination between SKPD in Gowa Regency, the geographical condition of Gowa Regency which is mostly highlands resulting in uneven internet network accessibility, lack of human resources (SDM) capabilities, facilities and infrastructure have not been developed. qualified, and the availability of the budget is not sufficient.*

**Keywords:** Effectiveness; E-government; Implementatio; Government

## PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi telah mengubah seluruh sendi kehidupan manusia di dunia. Perubahan fundamental yang terjadi tidak saja terkait dengan tata cara masyarakat berkomunikasi satu sama lain namun juga merambah tata cara bernegara, berekonomi dan lain sebagainya. Dengan internet, pemerintahan, bisnis dan komunikasi dapat dilakukan secara *real time*, digital, lintas batas dan murah. Dunia bisnis yang paling cepat dan inovatif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Aktivitas bisnis berbasis teknologi informasi berkembang sangat pesat. Industri digital dan bisnis rintisan (*start-up*) berbasis digital berkembang pesat, misalnya penyedia jasa transportasi berbasis daring, toko berbasis daring (*marketplace*) dan lain sebagainya. Ragam pekerjaan baru turut bermunculan, misalnya *apps-developer*, *programmer*, *web-developer* dan lainnya.

Di tengah pesatnya inovasi teknologi informasi, membuat kehidupan saat ini dan yang akan datang makin kompetitif, terbuka, cepat, tepat dan berstandar tinggi. Hal tersebut telah berkembang menjadi ‘tuntutan’ global. Dunia bisnis telah melakukan respon dengan digitalisasi bisnis yang tidak saja berorientasikan pelayanan terbaik kepada konsumen, namun juga telah mengeksploitasi teknologi informasi sebagai sumber peningkatan profit yang berlipat ganda. Sementara itu, pemerintahan di banyak negara termasuk Indonesia, masih ‘loading’ untuk optimalisasi teknologi informasi dalam elektronikasi tata kelola pemerintahan (*e-government*). Menurut Sonny (2013) menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan informasi dalam *e-government* telah mempengaruhi pola manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hubungannya antar institusi pemerintahan (*Government to Government*), masyarakat (*Government to Citizens*), dunia usaha (*Government to Business*), dan pegawai/karyawan (*Government to Employees*).

Kebijakan dan strategi tersebut juga telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* di seluruh jajaran pemerintahan secara menyeluruh. Penggunaan teknologi informasi dalam *e-government* menurut Parsaorantua *et al.* (2017) disinyalir menjanjikan efisiensi dan efektivitas bagi pemerintah dan masyarakat, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global, dan transparansi, serta menurut Nurita (2016) meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun, implementasi *e-government* belum tersentralisir dengan baik ke seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Indonesia masih berada pada peringkat tujuh (7) berdasarkan *E-government Development Index* negara-negara ASEAN yang dibuktikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. *E-government Development Index* Negara ASEAN Tahun 2010-2020**

No.	Negara	Nilai Rata-Rata					
		2010	2012	2014	2016	2018	2020
1.	Singapura	0,7476	0,8474	0,9076	0,8828	0,8812	0,9150
2.	Malaysia	0,6101	0,6703	0,6115	0,6175	0,7174	0,7892
3.	Brunei Darussalam	0,4796	0,625	0,5042	0,5298	0,6923	0,7389
4.	Thailand	0,4653	0,5093	0,4631	0,5522	0,6543	0,7565
5.	Filipina	0,4637	0,513	0,4768	0,5766	0,6512	0,6892
6.	Vietnam	0,4454	0,5217	0,4705	0,5143	0,5931	0,6667
7.	Indonesia	0,4026	0,4949	0,4487	0,4478	0,5258	0,6612
8.	Timor Leste	0,2273	0,2365	0,2528	0,2582	0,3816	0,4649
9.	Kamboja	0,2878	0,2902	0,2999	0,2593	0,3753	0,5113
10.	Myanmar	0,2818	0,2703	0,1869	0,2362	0,3328	0,7892
11.	Laos	0,2637	0,2935	0,2659	0,309	0,3056	0,3288
	Asia Tenggara	0,3828	0,4793	0,4434	0,4712	0,5555	0,6321
	Dunia	0,4199	0,4882	0,4712	0,4922	0,5491	0,5988

(Sumber: *United Nation E-Government Knowledgebase* tahun 2020)

Berdasarkan tabel 1. menyatakan bahwa hingga pada tahun 2020 Indonesia juga telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Secara global, Indonesia yang pada tahun 2018 menempati peringkat 107 dunia, pada tahun 2002 meningkat menjadi peringkat 88 dunia. Terlihat dari *index* yang diperoleh Indonesia juga mengalami peningkatan dan melampaui rata-rata *index* Asia Tenggara dan dunia. Namun, di sisi lain, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih terbelakang tertinggal dari negara-negara tetangga. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian oleh Masyhur (2017) mengungkapkan bahwa secara kuantitas jumlah penelitian-penelitian terkait *e-government* di Indonesia masih kurang sehingga tidak menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan *e-government* di Indonesia, namun fakta tersebut membuka potensi penelitian dengan tema *e-government* yang masih sangat besar. Dengan demikian, penelitian dengan tema tersebut membutuhkan dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai lembaga terkait sehingga berkontribusi dalam meningkatkan posisi *e-government* Indonesia.

Pernyataan tersebut di atas mengindikasikan bahwa sampai sekarang pemerintah Indonesia masih berupaya dalam mengembangkan pelaksanaan *e-government* dengan mewajibkan seluruh pemerintahan dan lembaga publik memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Yunita dan Aprianto (2018) menyatakan bahwa berdasarkan dari hasil *assessing* ke sejumlah 543 *website*

pemerintah daerah, hasilnya kemudian dipetakan ke dalam model-model tahapan *e-government* sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan diperoleh sejumlah 83 pemerintah daerah masih dalam tahap pertama (persiapan), 341 dalam tahap kedua (pematangan), 115 dalam tahap ketiga (pemanfaatan), dan hanya 4 pemerintah daerah yang telah masuk ke dalam tahap keempat (pemanfaatan).

Pemerintah daerah Kabupaten Gowa adalah salah satu yang telah mengembangkan konsep *e-government* dengan maksud dan tujuan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi yang diharapkan berdampak pada kemudahan memberikan informasi maupun berkoordinasi antar lembaga pemerintahan maupun dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa, maka dibentuklah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan visi terwujudnya pelayanan informasi dan komunikasi berbasis teknologi menuju masyarakat Kabupaten Gowa yang berdaya saing dengan tata kelola pemerintah yang baik.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai instansi pemerintahan yang berkaitan dan bertanggung jawab dalam pengembangan konsep *e-government* melalui fungsi teknologi informasi dan komunikasi berupa *website* dan aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang telah diterapkan di Kabupaten Gowa yang secara keseluruhan telah melakukan inovasi yang memberikan kemudahan bagi pegawai memperoleh informasi, data dan berbagai program (Jumaisa *et al.*, 2020). Aplikasi tersebut dibuat dan dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa demi meningkatkan pelayanan kepegawaian dilingkup pemerintahan Kabupaten Gowa.

Walaupun *e-government* sementara dipacu dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian serta instansi pemerintahan Kabupaten Gowa lainnya, namun masih terdapat permasalahan yang mengakibatkan *e-government* tidak berjalan dengan baik. Banyaknya dana yang sudah dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Meskipun pelaksanaan proses revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa konsep yang jelas. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan *e-government* adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon di beberapa tempat di Kabupaten Gowa belum begitu lancar. Tidak semua dapat menjalankan penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pelayanan *e-government*. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik dari instansi pemerintah Kabupaten Gowa, kecamatan sampai ke desa atau kelurahan yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Hal ini belum terkoordinasi dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing bidang. Tak kalah penting lainnya adalah

permasalahan dalam kemampuan atau sumber daya manusia pengelola dan penggunaanya yang tidak merata, di mana ada yang sudah menguasai teknologi informasi dan ada yang tidak. Sejalan dengan permasalahan tersebut, hasil penelitian oleh Musfika (2018) menyatakan bahwa kendala yang sangat mempengaruhi implementasi *e-government* adalah faktor organisasi, sedangkan dua faktor lain, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor infrastruktur tidak mempengaruhi signifikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *e-government* pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Gowa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif yang mengungkapkan data deskriptif sebagai suatu pendekatan untuk memahami secara umum tentang fokus penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang kemudian mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan atau yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Kemudian data tersebut di analisis dengan tahapan, yakni reduksi data (*data reduction*) di mana data yang diperoleh oleh peneliti telah dipilih atau diseleksi dan disesuaikan dengan topik kajian yang sesuai terhadap fokus penelitian sehingga mempermudah dalam mengungkapkan hasil penelitian. Lalu, penyajian data (*data display*), yaitu penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif mengenai permasalahan yang telah dicantumkan. peneliti menyajikan data yang telah dipersiapkan secara rasional, logis dan sistematis agar mudah dipahami. Terakhir, verifikasi (*verification*) di mana data-data tersebut diidentifikasi kemudian dihubungkan agar membentuk pola dan struktur yang sistematis berdasar atas teori dan secara rasional. Hasil pengolahan tersebut yang menjadi dasar dari penarikan kesimpulan oleh tim peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Gowa**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas menjadi ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana tujuan telah tercapai, baik secara kualitas maupun waktu yang berorientasi pada keluaran yang dihasilkan.

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012). Dalam hal ini, efektivitas yang dimaksud adalah pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Adapun ukuran efektivitas dari pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut:

**a. *Input***

Definisi *input* adalah sebagai dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan (Sedarmayanti, 2009). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gowa telah membentuk Peraturan Bupati Gowa Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Kelola dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*E-government*) Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Peraturan Bupati tersebut merupakan dasar dan pijakan bagi pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengimplementasikan *e-government*. Termaktub dalam peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 5 bahwa “*Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa, sebagai unit/satuan kerja yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi dilingkup pemerintah Kabupaten Gowa*”. Oleh sebab itu, adanya *input* berupa hukum yang mengikat menjadi dasar pelaksanaan *e-government* bagi pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan pemerintah Kabupaten Gowa sebagai *good governance*.

Selain itu, *input* yang berupa fasilitas fisik digunakan untuk menjalankan penyelenggaraan *e-government* merupakan faktor penting karena hal tersebut juga telah termaktub dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 37 Tahun 2017 pada pasal 5 bahwa “Pelaksanaan tata kelola informasi dan komunikasi (e-government), meliputi infrastruktur jaringan dan komputer, penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, pengadaan barang dan jasa elektronik, keamanan informasi, dan pembiayaan”. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan bahwa standard operating procedure (SOP) dan peralatan perlengkapan dari implementasi *e-government* telah sesuai. Berikut adalah tabel dari keterkaitan sop dan peralatan perlengkapan *e-government*.

**Tabel 2. Keterkaitan SOP dan Peralatan Perlengkapan *E-government***

No.	Keterkaitan SOP	No.	Peralatan Perlengkapan
1	SOP Survey Lapangan	1	Jaringan Internet
2	SOP Pengesahan Naskah Dinas	2	Modem, Wifi dan <i>Router Board</i>
3	SOP <i>Honorarium Team</i> Pengelolaan <i>Website</i>	3	Komputer <i>Server</i>
4	SOP Pemeliharaan, Redesain, Sewa <i>Hosting</i>	4	Komputer Administrator
5	Pelatihan Admin Team Pengelola <i>Website</i>	5	Laptop
		6	Printer dan scanner
		7	<i>Software</i> Aplikasi <i>Database</i> dan Aplikasi Pendukung
		8	Ruang <i>Server</i>
		9	UPS
		10	<i>Air Conditioner</i>
		11	Kamera
		12	<i>Handy Cam</i>
		13	GPS ( <i>Global Position System</i> )
		14	<i>Handphone/telepon</i>
		15	<i>Handy Talkie</i>

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2021)

### **Proses Produksi**

Proses produksi merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama mengolah masukan agar menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi pemakaiannya (Sedarmayanti, 2009). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pemerintahan Kabupaten Gowa, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa adalah yang bertugas dalam pembuatan aplikasi maupun *website* bagi institusi pemerintahan di Kabupaten Gowa dalam hal penyelenggaraan *e-government*. Adapun dalam proses produksi dalam penerapan *e-government* melalui *website* oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut.

1. Langkah Awal

- a) Pencarian dan penyusunan data berupa data-data (gambar, dokumen dan video) yang dilaksanakan oleh *user* (pencari informasi dan berita) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- b) Administrator *editing*; Pencari informasi dan berita menyerahkan data-data hasil pencarian dan diserahkan kepada administrator/pengumpul berita di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas/Badan Instansi.

2. Langkah Utama

- a) *Webmaster/admin* pengelola *website* melakukan *editing* informasi berupa data (gambar, dokumen dan video) sebelum proses *update* data-data informasi yang akan di tampilkan pada *website*.
- b) Proses *filtering*; Kepala Dinas berhak melakukan filtering (penyaringan) informasi berupa data-data (gambar, dokumen dan video) sebelum proses *update* data-data informasi yang akan di tampilkan pada *website*.
- c) Kelayakan *update* berita; Jika informasi berupa data-data (gambar, dokumen dan video telah memenuhi syarat untuk dilakukan *update* ke tampilan *website*, maka *webmaster/admin* pengelola *website* akan menampilkan/ mempublikasikan data-data tersebut pada tampilan *website*.
- d) Jika informasi berupa data-data (gambar, dokumen dan video) tidak layak untuk ditampilkan pada halaman *website* maka *webmaster/admin* pengelola *website* berhak untuk tidak menampilkan/mempublikasikan informasi tersebut pada tampilan *website*.
- e) Data-data yang telah melalui proses *filtering* dan *editing* yang akan tampilan *website* di lakukan proses pengumpulan informasi yang telah siap untuk dipublikasikan pada tampilan *website*.

3. Langkah Akhir

- a) Data-data yang telah melalui proses *filtering* dan *editing* harus segera di tampilkan/dipublikasikan pada tampilan *website*.
- b) Selain itu *webmaster/admin* pengelola *website* juga melakukan pemeliharaan, *monitoring*, pengawasan dan proteksi keamanan *website* dan jaringan *website*.

Adapun dalam proses tersebut ditemukan beberapa kendala, seperti beberapa pihak institusi pemerintahan terkait lebih memilih untuk menggunakan pihak ketiga dalam proses pembuatan *website*, seperti *website* DPRD Kabupaten Gowa. Padahal, dari segi fasilitas pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa telah mumpuni. Adapun permasalahan tersebut timbul akibat dari koordinasi antar pihak pemerintah yang belum berjalan dengan baik.

**b. Output**

*Output* merupakan unsur-unsur yang memiliki berbagai macam keluaran yang dihasilkan dari proses produksi (Sedarmayanti, 2009). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Gowa tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan informasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, menjalankan aktivitas pemerintahan secara efektif



dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program dan pengambilan keputusan. Namun, aplikasi dan *website* pemerintah Kabupaten Gowa ternyata belum banyak digunakan oleh masyarakat dikarenakan beberapa aplikasi belum disosialisasikan oleh pemerintah. Sebut saja, aplikasi *Whistle Blowing system* (WBS) oleh Inspektorat Kabupaten Gowa yang telah ada sejak tahun awal tahun 2020, namun belum diresmikan dan disosialisasikan hingga sekarang. Padahal, penerapan aplikasi WBS sangat penting karena merupakan bagian dari perwujudan *good governance*. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Paramitha dan Adiputra (2020) menyatakan bahwa *whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan efektivitas pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dan penyimpangan dalam pemerintahan, seperti tindakan korupsi.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan *E-government* di Kabupaten Gowa**

#### **a. Kurangnya Koordinasi antar SKPD**

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Hasibuan, 2014). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Gowa sudah beralih untuk menerapkan sistem teknologi informasi guna menunjang penyelenggaraan *e-government*, baik yang sifatnya internal (hanya dapat diakses oleh SKPD terkait), seperti Simda Keuangan dan Simda BMD maupun yang bersifat eksternal (dapat diakses oleh masyarakat umum dan dipergunakan untuk keperluan pelayanan), seperti layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Whatsapp yang terintegrasi dengan sistem FIFO (*First In, First Out*) menggunakan *google form* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gowa.

Namun, masih ditemukan beberapa SKPD yang tidak memiliki *website*. Keberadaan *website* menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat/publik. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Gowa tahun 2021, sejauh ini hanya 13 dari 36 SKPD yang memiliki *website*. Dari 13 SKPD tersebut, terdapat pula SKPD yang mengembangkan *website*, namun terpisah satu sama lain atau tidak terintegrasi dengan sistem yang telah dibangun (tidak berdomain *go.id*). Hal ini terjadi karena SKPD yang bersangkutan menyusun anggaran khusus untuk pembuatan *website*. Padahal setiap tahunnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa telah menyediakan setidaknya 10 kuota *sub domain* resmi pemerintah yang dapat dipergunakan oleh SKPD tersebut. Adanya SKPD yang membangun infrastruktur sendiri tanpa berkoordinasi dengan Diskominfo memungkinkan terjadinya tidak adanya efisiensi pengelolaan anggaran dan lemahnya sistem pengamanan informasi.

### **b. Kondisi Geografis**

Kondisi geografis mencerminkan suatu integrasi wilayah yaitu bagaimana wilayah-wilayah itu tersusun oleh gejala-gejala fisik dan sosial. Kabupaten Gowa terdiri atas 18 kecamatan dengan luas wilayah dataran tinggi sebesar 72,26 % dan luas wilayah dataran rendah sebesar 27,74 % (Nur Muhammad, 2021). Dengan kondisi geografis tersebut memerlukan perencanaan yang matang agar penerapan *e-government* dapat terjangkau luas ke seluruh wilayah. Karena masih banyak wilayah di dataran tinggi Kabupaten Gowa yang belum terjangkau internet. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis *online* yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa menjadi bukti efektivitas penerapan *e-government*. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas masyarakat memberikan respon positif dan senang atas pelayanan *online* khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah dataran tinggi. Sebab secara tidak langsung, pelayanan *online* ini dapat memangkas biaya transportasi dan waktu perjalanan mereka yang cukup jauh.

### **c. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aspek penting dalam pengembangan *e-government* di Indonesia adalah sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi (*e-skill*) dan kompeten dalam mengimplementasikan konsep-konsep pelayanan berbasis elektronik (Masyhur, 2017). Selain itu, menurut Maskikit (2017) bahwasanya ketidaksiapan sumber daya manusia baik dari segi dukungan di dalam pengembangan SDM dalam hal ini peningkatan kualitas SDM belum memadai, kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan sumber daya manusia bagi operator, *programmer* dan analis, pemahaman pegawai tentang konsep dari *e-government* yang masih minim.

Adapun dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pelaksanaan *e-government* pemerintah daerah Kabupaten Gowa ternyata banyaknya SKPD yang belum menerapkan sistem teknologi informasi secara totalitas dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan juga dipengaruhi oleh keterbatasan SDM. SDM yang berkompeten dalam menjalankan sistem teknologi informasi jika ditinjau dari latar belakang keilmuan TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) masih terhitung sedikit. Demikian halnya, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan/mengembangkan keterampilan dan keahlian pegawai masih tergolong minim. Sehingga apabila dilakukan pemeliharaan atau terjadi kerusakan pada perangkat lunak maupun perangkat keras, maka perbaikan yang semestinya dikerjakan oleh teknisi sendiri kebanyakan diambil alih oleh pihak ketiga. Hal tersebut berimplikasi pada kurang optimalnya layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

### **d. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja (Moenir, 2014). Demikian halnya dalam penerapan *e-government*, sarana dan prasarana merupakan tahap awal yang harus dibangun. Berdasarkan hasil penelitian, adapun sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,

dan Persandian Kabupaten Gowa yang tersedia sudah cukup mendukung, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 4. Daftar Aset Penunjang Pelaksanaan *E-Government* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa**

No.	Jenis Aset	Jumlah (buah)
1	Perangkat/alat Komunikasi	57
2	Alat Pemancar	24
3	Perangkat Lunak/Aplikasi	13
4	Jaringan	401
5	Komputer	510

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2021)

**e. Ketersediaan Anggaran**

Ketersediaan anggaran merupakan unsur terpenting dalam penerapan *e-government* karena akan mempengaruhi terlaksana atau tidaknya dari penerapan *e-government* tersebut (Sonny, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, Halim dan Kusufi (2012) berpendapat bahwa anggaran memiliki peranan yang begitu besar dalam mewujudkan *e-government*. Anggaran dijadikan sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal daerah, alat politik pemerintah daerah, alat komunikasi dan koordinasi, dan juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat penilaian kinerja dari pemerintah daerah. Selain itu tentunya anggaran memiliki fungsi untuk dijadikan sebagai alat motivasi bagi pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran sendiri pada dasarnya memegang peranan yang sangat besar dalam rangka mewujudkan *e-government*.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kendala yang dialami oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai dinas yang berwenang dalam menjamin keberlangsungan pengembangan *e-government* adalah persoalan anggaran yang belum mencukupi untuk melakukan integrasi pelayanan penuh secara *online* di Kabupaten Gowa. Adapun anggaran yang didapatkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa hanya berkisar 7 miliar yang mana masih terhitung jauh jika dibandingkan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang memiliki anggaran sebesar 33 miliar. Ditambah lagi, kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung mengharuskan setiap SKPD harus mampu mengatur kembali anggarannya, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa. Pemakaian sebagian anggaran harus dialihkan untuk keperluan penanganan dampak pandemi Covid-19.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Gowa belum cukup efektif walaupun dari segi *input* telah tersedianya payung hukum pelaksanaan *e-government* melalui Peraturan Bupati Gowa Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Kelola dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*E-government*) Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa dan segi produksi, telah tersedia fasilitas pembuatan *website* dan aplikasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa, namun dari segi *output*, ternyata masih banyak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Gowa yang belum memiliki *website* maupun aplikasi penunjang pelaksanaan *e-government*. Se jauh ini hanya 13 dari 36 SKPD yang memiliki *website*. Dari 13 SKPD tersebut, terdapat pula SKPD yang mengembangkan *website*, namun terpisah satu sama lain atau tidak terintegrasi dengan sistem yang telah dibangun (tidak berdomain *go.id*). Adapun faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Gowa, yaitu kurangnya koordinasi antara SKPD di Kabupaten Gowa, kondisi geografis Kabupaten Gowa yang sebagian besar daratan tinggi mengakibatkan aksesibilitas jaringan internet belum merata, kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana belum mumpuni, serta ketersediaan anggaran yang belum mencukupi.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan menyediakan Peraturan Bupati perihal pembuatan *website* dan aplikasi dalam proses implementasi *e-government* oleh SKPD terkait sehingga tidak adanya lagi institusi pemerintahan yang menggunakan pihak ketiga dalam pembuatan *website* maupun aplikasi. Di satu sisi, setiap SKPD juga diharapkan sadar dan eksis dalam penggunaan teknologi dan informasi demi mendukung efektivitas pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Gowa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim dan Kusufi. 2012, Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi, Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu. 2014, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jumaisa, M. I. Ansari, A. Mahsyar, "Inovasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Di BKPSDM Kabupaten Gowa". Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) Vol 1 No 1 Tahun 2020.
- Maskikit, Coleta, "Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi E-Government di Kabupaten Merauke". DINAMIS Vol 1 No 12 Tahun 2017.

- Masyhur, F, “Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)”. IPTEK-KOM Vol 19 No 1 Tahun 2017.
- Moenir, H. A. S. 2014, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nur, M. 2021. Faktor Sukses Penerapan E-Government dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Paramitha, N. P. Y., dan I. M. P. Adiputra, “Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa”. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha) Vol 11 No 2 Tahun 2020.
- Parsaorantua P. H., Y. Pasoreh, dan S. A. Rondonuwu, “Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado)”. Acta Diurna Vol 6 No 13 Tahun 2017.
- Rahmat Musfika, “Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie”. Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Vol 2 No 1 Tahun 2018.
- Riski Febria Nurita, “Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang”. Jurnal Cakrawala Hukum Vol 7 No 2 Tahun 2016.
- Rosalina, Iga, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Vol 1 No 1 Tahun 2012.
- Sedarmayanti. 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung: Mandar Maju.
- Sonny, “Analisis Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Jurnal Katalogis Vol 1 No 7 Tahun 2013.
- Yunita, N. P., dan R. D. Aprianto. Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (pp. 329-336). Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Teknik Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.